

BAB I

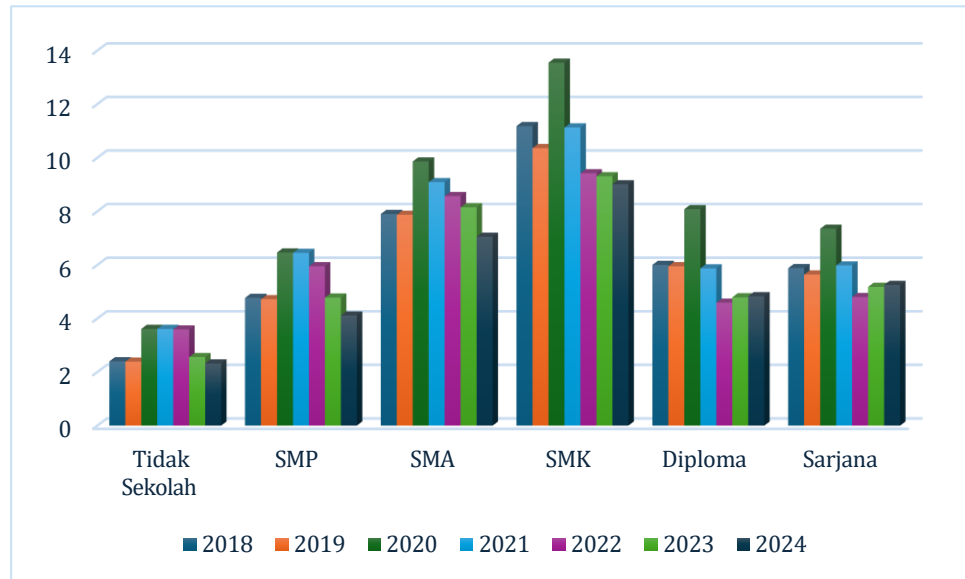
PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Investasi dalam modal manusia menjadi kepentingan prioritas di Indonesia, hal ini mencakup pendidikan mulai dari umum hingga perguruan tinggi (Gog et al., 2024). Kebijakan pembelajaran memiliki tujuan ganda yaitu untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial. Seiring transformasi ekonomi menuju sistem berbasis pengetahuan dan digitalisasi, Indonesia mempertahankan daya saingnya dengan memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan yang memadai untuk memenuhi tuntutan baru di pasar kerja.

Di sisi lain, pendidikan bertujuan memfasilitasi mobilitas karier berkelanjutan bagi seluruh warga negara, terlepas dari titik awal mereka, agar setiap individu dapat mewujudkan potensi terbaiknya (Satsevich et al., 2021). Pendidikan sangat relevan untuk memastikan masyarakat dapat memanfaatkan perubahan ekonomi yang tak terhindarkan dan terus memperoleh manfaat dari pembangunan ekonomi meskipun terdapat disrupsi akibat budaya, kemajuan teknologi maupun faktor eksternal lainnya.

Selain pendidikan, pengalaman kerja merupakan nilai tambah yang dimiliki individu atau tenaga kerja dalam mendapatkan pekerjaan atau menghindari status pengangguran. Menurut (Oswald-Egg & Renold, 2021), tenaga kerja dengan pengalaman lebih banyak akan lebih diminati di pasar tenaga kerja. Meskipun demikian, implementasi manajemen Bursa Kerja Khusus (BKK) pada beberapa SMK di Indonesia belum mampu mencapai hasil yang optimal. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian.

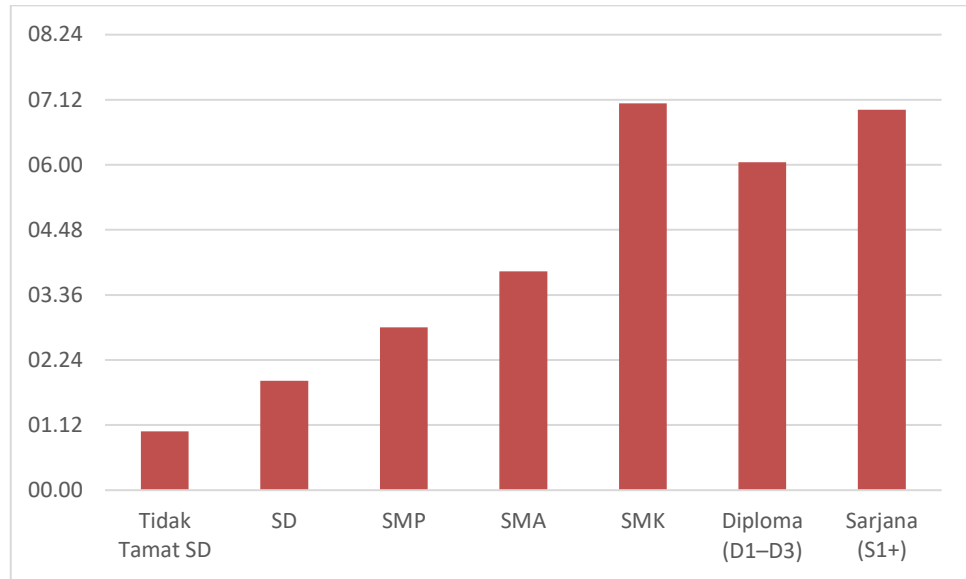


Gambar 1. 1 Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

Berdasarkan data diatas, lulusan SMK mencatat tingkat pengangguran tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lain. Pada tahun 2024, angka pengangguran SMK mencapai 9,01% dengan puncaknya di tahun 2020 di angka 13,55%. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun SMK dirancang untuk mencetak tenaga kerja terampil, kesenjangan antara kompetensi dasar yang diajarkan dengan kebutuhan dinamis industri menjadi penyebab utama kerentanan pengangguran.

Di sinilah peran Bursa Kerja Khusus (BKK) menjadi sangat penting. Fungsi BKK tidak hanya menjembatani penyaluran lulusan ke industri, tetapi juga harus memastikan kurikulum dan program pelatihan selaras dengan tren pasar kerja. Selain itu, pengalaman kerja melalui magang (*internship*) perlu ditingkatkan, karena tidak hanya memperkuat keterampilan teknis, tetapi juga membekali individu dengan soft skills, jaringan dengan orang-orang yang profesional serta memahami realitas di dunia kerja.



Gambar 1. 2 Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Blitar

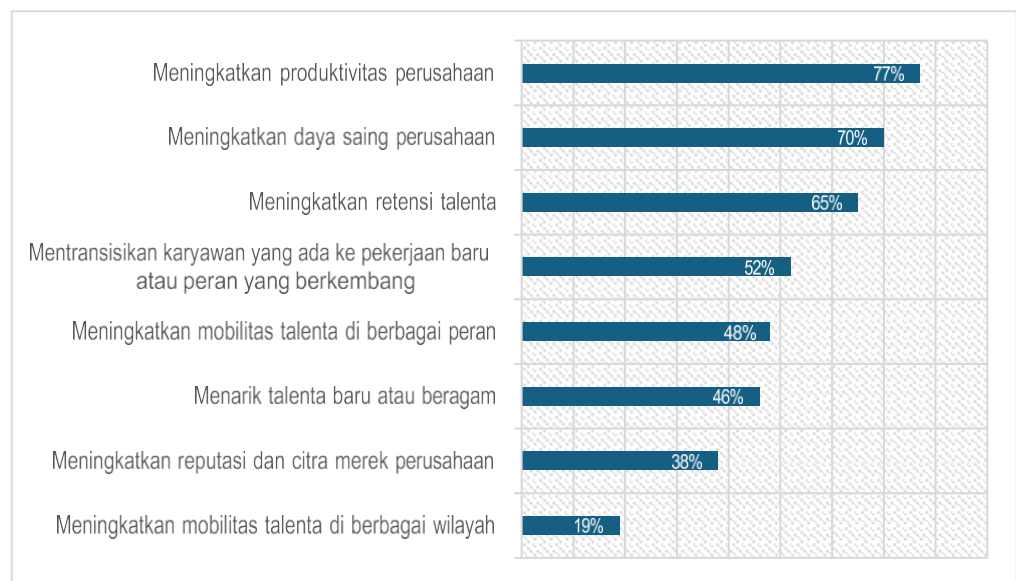
Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

Berdasarkan data diatas, tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenjang pendidikan di Kabupaten Blitar pada tahun 2025. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terlihat 7,12% secara konsisten menempati posisi tertinggi dalam angka pengangguran dibandingkan dengan lulusan dari jenjang pendidikan lainnya, seperti SMA, SMP, maupun perguruan tinggi. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan antara tujuan pendidikan vokasional dengan realitas di lapangan.

Secara ideal, lulusan SMK dirancang untuk langsung memasuki dunia kerja dengan keterampilan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan industri. Namun, data tersebut mengindikasikan bahwa lulusan SMK justru paling rentan terhadap pengangguran. Fakta ini menguatkan pernyataan dalam latar belakang penelitian bahwa terdapat kesenjangan antara kompetensi yang

diberikan selama masa studi dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri (DUDI). Salah satu penyebab utama dari kondisi ini adalah belum optimalnya peran Bursa Kerja Khusus (BKK) dalam memfasilitasi penempatan kerja bagi lulusan.

Dengan demikian, data tersebut menjadi dasar empiris yang menegaskan urgensi perlunya evaluasi terhadap efektivitas pelayanan BKK di SMK PGRI WLINGI. Jika fungsi strategis BKK sebagai penghubung antara dunia pendidikan dan dunia kerja dapat dijalankan secara maksimal, maka angka pengangguran di kalangan lulusan SMK, khususnya di Kabupaten Blitar, dapat ditekan secara signifikan.



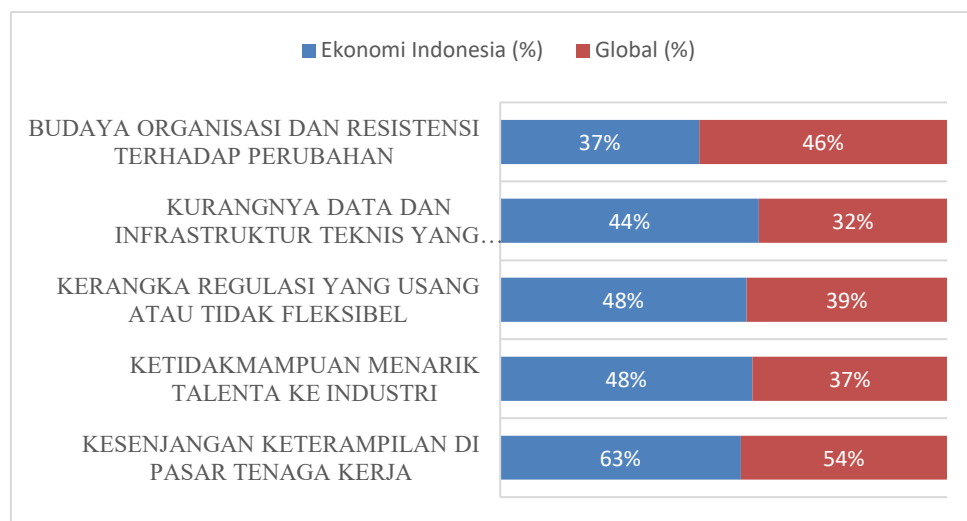
Gambar 1. 3 Hasil yang Diharapkan dari Investasi dalam Pelatihan

Sumber: *World Economic Forum Future of Jobs Report, 2025*

Berdasarkan pada laporan survei World Economic Forum tahun 2024, sebesar 77% pemberi kerja mengharapkan pelatihan dapat meningkatkan produktivitas. BKK yang efektif berperan penting dalam menyediakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri, baik melalui

program pelatihan langsung, sertifikasi keahlian atau kerja sama dengan perusahaan. Pekerja yang terserap melalui BKK memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menjalankan tugas mereka, sehingga berkontribusi pada peningkatan produktivitas perusahaan.

Berdasarkan *Future of Jobs Survey 2025*, kesenjangan keterampilan di pasar tenaga kerja merupakan hambatan utama yang dialami Indonesia saat ini. Hambatan ini terjadi di hampir semua industri dan wilayah.



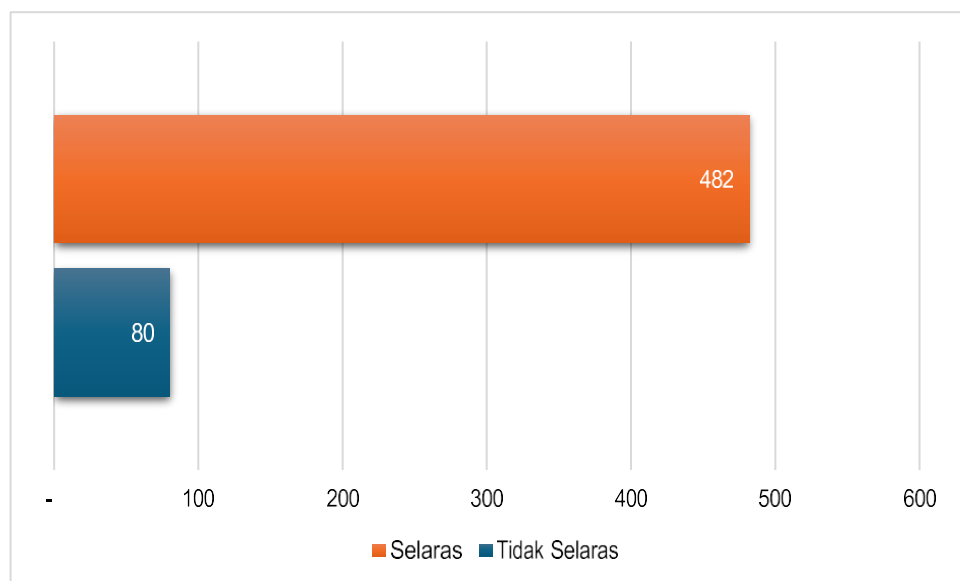
Gambar 1. 4 Hambatan Perusahaan

Sumber: World Economic Forum, Indonesia Statistics 2025

Data dari *Future of Jobs Surveys 2025* menunjukkan bahwa kesenjangan keterampilan di Indonesia sebesar 63% berada di atas rata-rata global (54%). Salah satu faktor penyebabnya mencakup ketidakselarasan antara kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri, serta minimnya adopsi teknologi dalam pelatihan tenaga kerja. Hal ini salah satunya disebabkan oleh pelatihan yang tidak responsif terhadap dinamika pasar kerja. Untuk meningkatkan efektivitas, BKK perlu mengintegrasikan kurikulum yang terhubung dengan

database industri untuk memperkuat kemitraan dengan perusahaan dalam penyusunan modul pelatihan. Tanpa intervensi tersebut, BKK dan fasilitas pelatihan lainnya akan terus terjebak dalam lingkaran ketidakefektifan, akibatnya kesenjangan keterampilan dan daya saing tenaga kerja Indonesia semakin tertinggal dengan negara-negara lain.

Capaian kinerja BKK di SMK PGRI WLINGI saat ini dapat diasumsikan belum berjalan dengan efektif atau belum maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi pelayanan penempatan kerja serta bimbingan karir kepada siswa maupun alumni SMK.



Gambar 1. 5 Keselarasan Bekerja dan Berwirausaha

Sumber: BKK SMK PGRI WLINGI 2024

Berdasarkan data kelulusan alumni 2024 yang diperoleh, terlihat bahwa adanya keselarasan yang signifikan dalam waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan. Hampir 500 lulusan berhasil mendapatkan pekerjaan yang selaras dengan keahlian dan jurusan dalam waktu kurang dari satu tahun

setelah lulus. Sebaliknya, 80 lulusan tidak berhasil memperoleh pekerjaan yang selaras dengan latar belakang jurusan pendidikannya selama di SMK.

Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK PGRI WLINGI menghadapi tantangan dalam memfasilitasi tenaga kerja. Kendala utama yaitu terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang memenuhi kriteria perusahaan. Hambatan lainnya juga keterbatasan peluang kerja yang dimana jumlah lowongan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah lulusan yang banyak, terutama di sektor-sektor tertentu yang diajarkan di SMK. Lulusan SMK terutama di wilayah jauh dari pusat industri kesulitan untuk mencari pekerjaan dan perusahaan lebih memilih tenaga kerja yang berpengalaman.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji masalah pada lulusan SMK terutama yang mendapatkan pelayanan dari bursa kerja khusus (BKK). Penelitian oleh Listiana (2019) menunjukkan bahwa banyak lulusan bekerja di bidang yang tidak terkait dengan spesialisasi mereka. Pekerjaan yang dipilih seringkali tidak selaras dengan latar belakang pendidikan vokasional mereka (Irwansyah et al., 2020). Selain itu, beberapa siswa tidak sepenuhnya memanfaatkan layanan yang disediakan oleh BKK selama proses pencarian kerja. Faktor seperti keengganan lulusan untuk bekerja di luar wilayah asal dan sistem pelacakan lulusan yang buruk yang umum ditemui di BKK semakin memperparah masalah ini (Ula et al., 2025).

Meskipun SMK dirancang sebagai penghasil tenaga kerja terampil namun masih ditemukan sistem dan pelatihan yang tidak efektif untuk mempersiapkan siswa maupun alumni di pasar tenaga kerja. Adanya kesenjangan antara keterampilan yang diajarkan di sekolah dengan tuntutan

dinamis industri, serta ketidakefektifan peran Bursa Kerja Khusus (BKK) dalam menjembatani lulusan dengan pasar kerja, membuat siswa kesulitan untuk mencari pekerjaan yang sesuai. Urgensi pada ancaman terhadap daya saing Indonesia di era ekonomi berbasis pengetahuan dan digital saat ini, di mana tenaga kerja perlu terus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan disrupsi pasar. Tanpa perbaikan sistemik pada fungsi BKK, lulusan SMK akan tetap rentan menganggur, sementara industri kekurangan tenaga kerja kompeten. Maka dalam penelitian ini diajukan topik untuk dibahas dengan judul **“Efektivitas Pelayanan Bursa Kerja Khusus (BKK) dalam Memfasilitasi Alumni sebagai Calon Tenaga Kerja di SMK PGRI WLINGI Kabupaten Blitar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disusun, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pelayanan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK PGRI WLINGI dalam memfasilitasi alumni sebagai calon tenaga kerja?
2. Sejauh mana hambatan dalam pelaksanaan pelayanan BKK mempengaruhi efektivitas fasilitasi ketenagakerjaan di SMK PGRI WLINGI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelayanan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK PGRI WLINGI dalam memfasilitasi penempatan tenaga kerja bagi

siswa dan alumni.

2. Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan BKK serta menganalisis pengaruhnya terhadap efektivitas fasilitasi ketenagakerjaan di SMK PGRI WLINGI.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat kita temukan ketika tujuan penelitian ini tercapai dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pada teori pendidikan vokasional dengan mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi kesenjangan antara kurikulum SMK dan kebutuhan industri, serta peran lembaga intermediasi yaitu Bursa Kerja Khusus dalam menjembatani kesenjangan pekerjaan.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Bursa Kerja Khusus

- a. Rekomendasi operasional untuk meningkatkan kualitas program, seperti penyusunan kurikulum berbasis data industri, peningkatan kolaborasi dengan perusahaan, dan sistem pelacakan alumni yang efektif.
- b. Panduan teknis untuk mengoptimalkan fungsi BKK sebagai penghubung antara SMK dan dunia kerja.

2. Bagi Siswa dan Alumni

- a. Peningkatan kompetensi teknis dan non-teknis yang dibutuhkan industri, sehingga memperbesar peluang terserap di pasar kerja.

- b. Akses lebih luas ke informasi lowongan kerja, pelatihan, dan jejaring profesional.
3. Bagi Industri dan Perusahaan
- Peluang untuk terlibat aktif dalam pengembangan kurikulum SMK sesuai kebutuhan spesifik perusahaan.
4. Bagi Pemerintah
- Dasar empiris untuk merumuskan kebijakan pendidikan vokasi yang lebih responsif dan penyusunan strategi nasional untuk mengurangi angka pengangguran lulusan vokasi melalui penguatan program BKK di seluruh Indonesia.